

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS USAHA MIKRO MAJALENGKA KULON MELALUI INOVASI PENGETAHUAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL UNTUK Mendukung PEKERJAAN LAYAK, KEBERLANJUTAN USAHA, DAN INKLUSIVITAS KOMUNITAS

Yani Syafei¹, Rahma Wahdiniwati², Hafni Rizanuddin Nur³, Hendar Rubedo⁴

^{1,2,3,4}Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia

Email: hendar.75422009@mahasiswa.unikom.ac.id

ABSTRAK

Majalengka Kulon memiliki potensi ekonomi lokal melalui ratusan pelaku usaha mikro, namun masih menghadapi keterbatasan inovasi, akses teknologi, dan jejaring usaha. Kondisi ini menuntut intervensi pemberdayaan yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas, penguatan jejaring, serta penerapan prinsip kewirausahaan sosial. Pendekatan tersebut selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan komunitas berdaya. Tujuan kegiatan ini adalah merancang program pengabdian berbasis inovasi, kewirausahaan sosial, dan digitalisasi untuk memperkuat daya saing UMKM di Desa Majalengka Kulon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang untuk memberdayakan pelaku usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan jejaring berbasis komunitas. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa program berhasil meningkatkan kapasitas pelaku UMKM Desa Majalengka Kulon melalui pelatihan, pendampingan, serta terbentuknya forum UMKM yang memperkuat kolaborasi dan jejaring usaha. Hasil kegiatan juga menghasilkan luaran tambahan berupa produk inovatif, media promosi digital, serta publikasi ilmiah dan populer yang memperluas akses pasar sekaligus mendorong penyebaran pengetahuan. Dalam jangka panjang, intervensi ini diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan mitra, memperluas jejaring bisnis, serta mewujudkan inklusivitas dengan melibatkan kelompok rentan dalam forum komunitas. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak multidimensi yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals dan memperkuat daya saing serta kemandirian UMKM lokal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, Pemberdayaan Komunitas, Inovasi Pengetahuan, Keberlanjutan Usaha.

ABSTRACT

Majalengka Kulon boasts local economic potential through hundreds of micro-entrepreneurs, yet still faces limitations in innovation, technology access, and business networks. This situation demands integrated empowerment interventions that involve capacity building, network strengthening, and the application of social entrepreneurship principles. This approach aligns with the sustainable development agenda, which emphasizes inclusive economic growth and empowered communities. The objective of this activity was to design a community service program based on innovation, social entrepreneurship, and digitalization to strengthen the competitiveness of MSMEs in Majalengka Kulon Village. The method used in this research was a community service approach designed to empower micro-entrepreneurs

through training, mentoring, and strengthening community-based networks. The conclusions of this community service activity indicate that the program successfully increased the capacity of MSMEs in Majalengka Kulon Village through training, mentoring, and the establishment of an MSME forum that strengthened collaboration and business networks. The results of the activity also produced additional outputs in the form of innovative products, digital promotional media, and scientific and popular publications that expand market access while encouraging the dissemination of knowledge. In the long term, this intervention is projected to increase partner income, expand business networks, and achieve inclusivity by involving vulnerable groups in community forums. Overall, this program has a multidimensional impact that supports the achievement of the Sustainable Development Goals and strengthens the competitiveness and independence of local MSMEs in a sustainable manner.

Keywords: MSMEs, Community Empowerment, Knowledge Innovation, Business Sustainability.

PENDAHULUAN

Majalengka Kulon yang terletak di wilayah Majalengka memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup signifikan, terutama melalui keberadaan komunitas pelaku usaha mikro. Berdasarkan data BUMDes Majalengka Kulon tahun 2023, terdapat kurang lebih 250 pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor makanan ringan. Meskipun memiliki potensi tersebut, pelaku usaha mikro di Majalengka Kulon masih menghadapi berbagai tantangan struktural, antara lain rendahnya kapasitas inovasi, terbatasnya akses terhadap teknologi dan pasar yang lebih luas, serta lemahnya kolaborasi kelembagaan dan jaringan usaha.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan pentingnya intervensi berbasis pemberdayaan yang sistemik dan berkelanjutan. Upaya peningkatan daya saing UMKM tidak cukup hanya dengan pelatihan teknis sesaat, tetapi membutuhkan strategi yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring sosial-ekonomi, dan pemanfaatan pengetahuan lokal serta teknologi tepat guna (Dewi, 2025). Dalam konteks ini, konsep pemberdayaan komunitas berbasis pengetahuan (knowledge-based community empowerment) menjadi sangat relevan. Menurut Putri et al. (2021), pemberdayaan yang berakar pada transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas kognitif komunitas dapat menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan, karena mengandalkan kekuatan dari dalam komunitas itu sendiri, bukan hanya ketergantungan pada bantuan luar.

Pendekatan ini juga selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Secara khusus, kegiatan ini mengarah pada pemenuhan tiga tujuan utama dalam SDGs, yaitu:

1. Goal 8 – *Decent Work and Economic Growth*, yang menekankan perlunya menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif;
2. Goal 9 – *Industry, Innovation and Infrastructure*, yang menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tangguh dan mendorong inovasi, termasuk pada sektor usaha kecil;
3. Goal 11 – *Sustainable Cities and Communities*, yang menggarisbawahi pentingnya membangun komunitas yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (Aziz & Najicha, 2024).

Dalam laporan tahunan SDGs (United Nations, 2020), disebutkan bahwa pengembangan UMKM lokal yang inovatif menjadi salah satu strategi utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengabdian yang berorientasi pada inovasi sosial dan penguatan kapasitas pelaku usaha mikro merupakan salah satu pilar penting dalam pencapaian agenda global.

Selanjutnya, dari perspektif kewirausahaan sosial, kegiatan ini berlandaskan pada OECD Guidelines on Social Entrepreneurship (OECD, 2021), yang menyatakan bahwa kewirausahaan sosial dapat menjadi katalisator dalam mengatasi kesenjangan sosial dan menciptakan nilai ekonomi secara bersamaan. Kewirausahaan sosial menekankan pentingnya penciptaan nilai bersama (*shared value*), yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai sosial, etika, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks Majalengka Kulon, pelaku usaha mikro memiliki peluang besar untuk mengembangkan model usaha yang berbasis pada nilai-nilai sosial, seperti pelestarian budaya lokal (kerajinan batik tulis, anyaman bambu), pelibatan kelompok rentan dalam proses produksi, dan pemanfaatan bahan baku lokal yang berkelanjutan (Hady et al., 2025).

Namun, untuk mewujudkan model kewirausahaan sosial yang tangguh, dibutuhkan intervensi yang dapat menjembatani gap antara potensi lokal dengan kebutuhan pasar modern. Di sinilah pentingnya pendekatan berbasis inovasi dan pengetahuan (Ilhamsyah et al., 2025). Sejalan dengan pendapat Chatterjee et al. (2022), UMKM di wilayah rural sering kali tidak mampu tumbuh karena terisolasi dari jaringan pengetahuan, teknologi, dan praktik bisnis yang adaptif. Oleh karena itu, pemberdayaan komunitas melalui kegiatan pengabdian harus dirancang sebagai ekosistem belajar kolektif, di mana pelaku usaha diberikan ruang untuk mengeksplorasi, belajar, berinovasi, dan tumbuh bersama dalam komunitas yang saling mendukung.

Aspek penting lainnya dalam desain program ini adalah integrasi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial sebagaimana dirumuskan dalam ISO 26000. Dokumen ini menegaskan bahwa organisasi, termasuk institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan kapasitas usaha kecil, dan promosi praktik bisnis yang etis dan inklusif (ISO, 2020). Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan mengedepankan prinsip-partisipatif, transparansi, kesetaraan, dan keberlanjutan – sebagaimana disarankan dalam ISO 26000.

Keterlibatan perguruan tinggi dalam pemberdayaan UMKM juga sejalan dengan mandat tridharma perguruan tinggi, terutama dalam konteks kolaborasi antara dunia akademik dengan masyarakat. Hasil studi Rahmawati & Wahdiniwati (2022) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kolaborasi dan knowledge-sharing yang dilakukan oleh perguruan tinggi memiliki dampak signifikan terhadap perubahan perilaku kewirausahaan, inovasi produk, serta penguatan jejaring bisnis di kalangan pelaku UMKM. Dalam konteks ini, kehadiran tim pengabdian dari akademisi diharapkan tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga membangun kerangka kerja pemberdayaan yang berbasis riset dan refleksi kritis.

Lebih lanjut, dengan adanya kemajuan teknologi dan ekonomi digital, pelaku UMKM di desa seperti Majalengka Kulon juga perlu dikenalkan pada teknologi informasi yang relevan, seperti penggunaan media sosial untuk pemasaran, pengelolaan keuangan digital, dan platform kolaborasi usaha. Integrasi teknologi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak dimaksudkan untuk menggantikan tradisi lokal, tetapi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi proses usaha. Hal ini sejalan dengan gagasan dalam literatur tentang digital inclusion for rural entrepreneurship (Kraus et al., 2021), yang menekankan pentingnya digitalisasi berbasis budaya lokal sebagai strategi peningkatan daya saing.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut yakni potensi lokal, tantangan struktural, teori pemberdayaan komunitas berbasis pengetahuan, prinsip tanggung jawab sosial, dan kerangka SDGs, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan holistik dan kolaboratif. Program ini akan berfokus pada tiga aspek utama:

1. Peningkatan kapasitas inovasi dan manajerial pelaku usaha mikro melalui pelatihan, mentoring, dan workshop berbasis kebutuhan riil;
2. Penerapan prinsip kewirausahaan sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam pengelolaan usaha lokal;

3. Penguatan jejaring usaha dan akses pasar berbasis digital dan komunitas.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi praktik baik (best practice) dalam mengimplementasikan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, dengan basis pendekatan ilmiah, partisipatif, dan berbasis nilai. Dalam jangka panjang, diharapkan terbentuk ekosistem usaha mikro yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan di Desa Majalengka Kulon, yang tidak hanya mendukung kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan identitas budaya lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha kecil dapat dipahami sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan secara independen oleh individu maupun badan usaha, yang tidak berafiliasi sebagai anak perusahaan maupun cabang dari usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung (Fuhrotun et al., 2022). Kategori usaha kecil ini ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya melalui kriteria yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang terkait, yang menekankan pada nilai kekayaan bersih atau aset (tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha) maupun pada jumlah penjualan tahunan (Telaumbanua, 2021).

Berdasarkan regulasi tersebut, usaha mikro digolongkan sebagai unit usaha dengan total aset maksimal Rp50.000.000, di luar kepemilikan tanah dan bangunan, serta omzet tahunan tidak melebihi Rp300.000.000. Selanjutnya, usaha kecil mencakup entitas dengan kepemilikan aset lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000, di luar tanah dan bangunan, dengan omzet tahunan antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000 (Syuhada et al., 2023). Adapun usaha menengah didefinisikan sebagai unit usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000, dan nilai penjualan tahunan di atas Rp2.500.000.000 sampai dengan batas tertinggi Rp50.000.000.000.

Selain menggunakan indikator berbasis nilai moneter, sejumlah instansi pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga memanfaatkan jumlah tenaga kerja sebagai parameter dalam membedakan skala usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar (Fitrawaty & Maipita, 2023). Menurut klasifikasi BPS, usaha mikro didefinisikan sebagai unit usaha yang memiliki hingga empat pekerja tetap, sementara usaha kecil mencakup unit dengan lima hingga sembilan belas pekerja, dan usaha menengah terdiri dari dua puluh hingga sembilan puluh sembilan pekerja. Perusahaan dengan jumlah pekerja lebih dari sembilan puluh sembilan orang digolongkan sebagai usaha besar (Al Farisi & Fasa, 2022).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang secara kuantitas mendominasi struktur ketenagakerjaan di Indonesia memiliki peran signifikan sebagai motor utama perekonomian nasional. Kapasitas sektor ini untuk berkembang akan sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, termasuk dalam beberapa dekade mendatang. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 60% pada tahun 2020, dengan porsi usaha mikro dan kecil sebesar 42% serta usaha menengah sekitar 18% dari total keseluruhan unit usaha (Lubis & Salsabila, 2024).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan segmen usaha yang paling dominan dalam struktur perekonomian nasional. Selain perannya yang signifikan, kelompok ini juga terbukti memiliki ketahanan relatif lebih tinggi terhadap berbagai tekanan yang muncul akibat krisis ekonomi. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya upaya perlindungan dan penguatan terhadap UMKM yang terdiri dari beragam kategori (Munthe et al., 2023). Secara umum, UMKM dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi. Pertama, Livelihood Activities, yaitu usaha yang berfungsi sebagai sarana mencari nafkah, yang lazim dikenal sebagai sektor informal, seperti pedagang kaki lima. Kedua, Micro Enterprise, yakni usaha dengan karakteristik pengrajin namun belum sepenuhnya memiliki orientasi kewirausahaan. Ketiga, Small Dynamic Enterprise, yaitu usaha kecil yang telah menunjukkan jiwa kewirausahaan serta mampu terlibat dalam kegiatan subkontrak maupun ekspor. Keempat, Fast Moving Enterprise, yakni usaha yang berjiwa wirausaha kuat dan berada pada tahap transformasi menuju usaha besar (Fitri, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Situasi dan Permasalahan Mitra

Desa Majalengka Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup tinggi. Keberadaan ±50 pelaku usaha mikro yang tergabung dalam komunitas UMKM menjadi salah satu kekuatan utama desa. Jenis usaha yang berkembang meliputi sektor pertanian (padi dan palawija), kerajinan tangan (seperti anyaman bambu dan batik tulis), serta produk olahan pangan lokal (seperti emping melinjo dan dodol). Produk-produk ini memiliki ciri khas lokal yang potensial untuk dikembangkan sebagai produk unggulan desa.

Namun, hasil observasi awal dan diskusi dengan pengelola BUMDes Majalengka Kulon menunjukkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Terdapat beberapa persoalan utama yang dihadapi oleh mitra, baik dari aspek internal komunitas usaha maupun lingkungan eksternalnya. Adapun analisis situasi dan permasalahan mitra dapat dipetakan ke dalam lima dimensi utama sebagai berikut:

1. Keterbatasan Inovasi Produk dan Pengembangan Usaha

Sebagian besar pelaku usaha mikro di Majalengka Kulon masih mempertahankan pola produksi tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun hal ini menunjukkan kekayaan kultural, namun minimnya pembaruan dari sisi desain, kualitas, maupun diversifikasi produk menyebabkan daya saing produk di pasar luar desa sangat rendah. Produk kerajinan seperti anyaman bambu dan batik tulis, misalnya, belum memiliki inovasi desain yang sesuai selera pasar modern. Selain itu, tidak adanya dokumentasi sistematis atas praktik usaha yang dijalankan menyebabkan hilangnya potensi knowledge sharing antarpelaku usaha (Rahman et al., 2025). Mitra belum memiliki strategi inovasi yang terstruktur atau sistem manajemen pengetahuan usaha yang terarah. Hal ini bertentangan dengan prinsip knowledge-based community empowerment (Putri et al., 2021), di mana komunitas perlu diberdayakan dengan basis pengetahuan agar mampu berinovasi secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Rendahnya Kapasitas Manajerial dan Kewirausahaan

Mayoritas pelaku usaha mikro di Desa Majalengka Kulon adalah individu dengan latar belakang pendidikan dasar-menengah yang belum memiliki pemahaman memadai tentang manajemen usaha modern, seperti perencanaan bisnis, pencatatan keuangan, segmentasi pasar, atau strategi pemasaran digital. Akibatnya, usaha cenderung tidak berkembang, bahkan stagnan. Banyak pelaku usaha juga belum memahami konsep kewirausahaan sosial, yaitu bagaimana menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan dampak sosial bagi komunitasnya (OECD, 2021). Dengan keterbatasan ini, komunitas usaha di Majalengka Kulon menjadi rentan terhadap tekanan pasar dan sulit menjalin kemitraan strategis jangka panjang.

3. Kelemahan Akses Terhadap Teknologi dan Pasar Digital

Di era digital, keterhubungan dengan teknologi informasi merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mikro (Darmawan, 2025). Namun, sebagian besar UMKM di Majalengka Kulon belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal, baik untuk keperluan promosi, transaksi, maupun pengelolaan usaha. Minimnya literasi digital menyebabkan mereka tidak mampu memanfaatkan media

sosial, platform marketplace, atau aplikasi pencatatan keuangan sederhana. Dalam konteks SDGs, khususnya Goal 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), kondisi ini mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dan inovasi teknologi yang dapat memperkuat daya saing ekonomi lokal.

4. Belum Terbangunnya Ekosistem Kolaboratif yang Inklusif

Meski terdapat komunitas pelaku usaha mikro di tingkat desa, belum terbentuk ekosistem kolaboratif yang saling mendukung antarpelaku usaha. Interaksi antar pelaku usaha bersifat informal dan sporadis, tidak terkoordinasi dalam sistem kelembagaan usaha yang kokoh. Belum ada forum rutin untuk berbagi informasi, pengalaman, atau kerja sama produksi-pemasaran (Elani et al., 2025). Kondisi ini memperkuat isolasi usaha-usaha kecil dan menimbulkan ketimpangan akses informasi, modal sosial, dan peluang pengembangan usaha. Padahal, SDGs Goal 11 (Sustainable Communities) menekankan pentingnya membangun komunitas yang tangguh, inklusif, dan berbasis jejaring sosial yang kuat.

5. Minimnya Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dalam Pengelolaan Usaha

Hampir seluruh pelaku usaha mikro di Majalengka Kulon belum memiliki pemahaman mengenai tanggung jawab sosial (social responsibility) dalam konteks usaha mikro. Tidak terdapat kesadaran kolektif untuk memperhatikan aspek lingkungan (pengelolaan limbah produksi), pemberdayaan kelompok rentan, atau kontribusi terhadap pelestarian budaya lokal melalui usaha (Zikri, 2024). Penerapan prinsip ISO 26000 sebagai panduan dalam tanggung jawab sosial organisasi masih belum dikenal di kalangan mitra. Padahal, penguatan nilai-nilai sosial dalam usaha merupakan bagian penting dari penciptaan keberlanjutan bisnis dan harmoni sosial.

Berdasarkan lima dimensi tersebut, maka permasalahan mitra dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1. Permasalahan Mitra

No	Dimensi Permasalahan	Permasalahan Utama
1	Inovasi dan Pengetahuan Usaha	Tidak adanya inovasi produk dan sistem berbagi pengetahuan antar pelaku usaha
2	Manajerial dan Kewirausahaan	Rendahnya kemampuan manajemen usaha dan pemahaman kewirausahaan sosial
3	Teknologi dan Digitalisasi Usaha	Tidak teraksesnya teknologi digital untuk pemasaran dan pencatatan usaha

4	Kolaborasi dan Kelembagaan Komunitas	Belum terbentuknya ekosistem kolaboratif berbasis jejaring dan kelembagaan usaha
5	Nilai Sosial dan Tanggung Jawab Usaha	Minimnya pemahaman dan praktik tanggung jawab sosial dalam aktivitas usaha

Mitra membutuhkan serangkaian intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut:

- Pelatihan inovasi produk dan pengemasan berbasis potensi lokal;
- Penguatan kapasitas manajerial dan pemahaman kewirausahaan sosial;
- Literasi digital dan pemanfaatan teknologi untuk pemasaran dan pembukuan;
- Fasilitasi pembentukan forum atau koperasi komunitas usaha;
- Sosialisasi prinsip tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha.

Tujuan dan Manfaat Program

Program pengabdian ini secara umum bertujuan untuk memberdayakan komunitas usaha mikro di Desa Majalengka Kulon agar mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya melalui pendekatan berbasis pengetahuan dan prinsip tanggung jawab sosial. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas inovasi pelaku usaha mikro melalui pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan produk, desain kemasan, dan diversifikasi usaha berbasis potensi lokal.
- Mengembangkan keterampilan manajerial dan kewirausahaan sosial agar pelaku usaha mampu mengelola bisnisnya secara efektif, berorientasi pada nilai sosial, dan menciptakan dampak positif bagi komunitas.
- Meningkatkan literasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran, pencatatan usaha, dan koneksi dengan pasar yang lebih luas (e-commerce, media sosial, dan katalog digital).
- Mendorong pembentukan ekosistem kelembagaan usaha komunitas yang inklusif, seperti forum UMKM, koperasi produksi/pemasaran, atau komunitas berbagi pengetahuan yang dikelola secara kolektif.
- Menanamkan prinsip tanggung jawab sosial dalam kegiatan usaha, melalui pengenalan dan integrasi prinsip ISO 26000 dan pendekatan pengembangan komunitas berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs.

Adapun manfaat bagi program ini akan berbeda-beda, baik bagi mitra, tim pelaksana dan institusi perguruan tinggi, serta bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain. Manfaat program bagi Mitra (Pelaku Usaha Mikro di Desa Majalengka Kulon) antara lain adalah sebagaimana berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan praktis dalam mengelola usaha berbasis inovasi dan teknologi, yang secara langsung dapat meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk.
2. Akses pada pendekatan kewirausahaan sosial dan nilai tanggung jawab sosial, yang dapat memperkuat legitimasi sosial usaha mikro dalam komunitas desa.
3. Terbentuknya jejaring kolaboratif antar pelaku usaha, yang memperkuat kelembagaan komunitas ekonomi dan mendukung kemitraan usaha yang lebih berkelanjutan.
4. Meningkatkan keberdayaan ekonomi keluarga dan komunitas, sejalan dengan prinsip pemberdayaan berbasis potensi lokal (community-based development).
5. Kesempatan untuk terhubung dengan ekosistem digital ekonomi lokal, sehingga produk-produk lokal Majalengka Kulon memiliki peluang pasar yang lebih luas, baik secara regional maupun nasional.

Adapun manfaat bagi Tim Pelaksana dan Institusi Perguruan Tinggi antara lain adalah sebagaimana berikut:

1. Implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan dan riset terapan.
2. Kontribusi dalam pencapaian SDGs dan agenda pembangunan nasional, terutama dalam penguatan UMKM, penciptaan pekerjaan layak, dan pembangunan komunitas berkelanjutan.
3. Peluang riset lanjutan berbasis hasil intervensi pengabdian, seperti studi dampak program terhadap pemberdayaan ekonomi lokal atau adopsi tanggung jawab sosial dalam UMKM.
4. Penguatan reputasi akademik dan sosial institusi, melalui keterlibatan aktif dalam membangun kapasitas masyarakat akar rumput secara partisipatif dan kolaboratif.

Terakhir, manfaat bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Lain adalah sebagaimana berikut:

1. Model intervensi pemberdayaan UMKM yang dapat direplikasi, sebagai referensi kebijakan pembangunan ekonomi desa berbasis inovasi dan nilai sosial.

2. Penguatan sinergi antara akademisi, komunitas, dan pemerintah desa, yang berkontribusi pada penciptaan tata kelola pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
3. Data awal dan model implementasi ISO 26000 dan SDGs di tingkat desa, yang dapat digunakan dalam pelaporan pembangunan lokal dan penyusunan perencanaan strategis.

Solusi Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pengelola BUMDes serta tokoh masyarakat Desa Majalengka Kulon, ditemukan sejumlah persoalan utama yang menghambat perkembangan komunitas usaha mikro lokal, khususnya di sektor kerajinan tangan, pertanian, dan olahan pangan lokal. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Rendahnya Kapasitas Inovasi dan Kreativitas Produk

Mayoritas pelaku usaha mikro masih mengandalkan proses produksi tradisional dengan inovasi terbatas. Produk anyaman bambu dan batik tulis misalnya, belum mengalami penyempurnaan desain atau fungsi untuk menyesuaikan dengan selera pasar kontemporer (Pangestuti & Sudrajat, 2025). Demikian pula olahan pangan seperti emping melinjo dan dodol masih minim dalam inovasi rasa, pengemasan, serta sertifikasi kesehatan pangan.

Solusi:

- a. Pelatihan dan pendampingan inovasi produk berbasis desain thinking dan orientasi pasar.
- b. Penerapan pendekatan *knowledge-based innovation* (Nonaka & Takeuchi, 2019), yang menekankan pentingnya kombinasi pengetahuan tacit dan eksplisit dalam pengembangan produk lokal.
- c. Penguatan nilai tambah melalui branding lokal dan inovasi kemasan yang sesuai dengan standar e-commerce.

2. Lemahnya Kapasitas Manajerial dan Kewirausahaan Sosial

Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pemahaman memadai tentang pencatatan keuangan, perencanaan bisnis, atau strategi pemasaran. Usaha dijalankan secara individual, tanpa orientasi skala ekonomi ataupun keberlanjutan sosial (Malik et al., 2024). Hal ini membuat banyak usaha stagnan atau hanya bersifat musiman.

Solusi:

- a. Edukasi dan pelatihan manajemen usaha mikro, kewirausahaan sosial, dan keberlanjutan usaha.
- b. Penerapan prinsip-prinsip *social entrepreneurship* sesuai pedoman OECD (2023), termasuk nilai partisipatif, keadilan sosial, dan inklusivitas dalam praktik usaha.
- c. Penguatan model bisnis sosial (*social business model canvas*) yang mengintegrasikan aspek finansial, sosial, dan lingkungan.

3. Rendahnya Literasi Digital dan Koneksi ke Pasar yang Lebih Luas

Keterbatasan akses dan pengetahuan teknologi digital menyebabkan banyak pelaku usaha mikro belum memanfaatkan platform digital untuk promosi atau penjualan. Padahal, peningkatan akses digital sangat penting di era ekonomi berbasis platform (*platform economy*).

Solusi:

- a. Pelatihan pemanfaatan media sosial, e-commerce, dan platform digital pemasaran lokal (seperti katalog desa atau BUMDes online store).
- b. Pendampingan teknis pembuatan konten promosi digital, foto produk, dan storytelling brand lokal.
- c. Penerapan pendekatan *community-based digital inclusion* (UNCTAD, 2021) untuk memastikan tidak ada komunitas yang tertinggal secara digital.

4. Lemahnya Kolaborasi Komunitas dan Kelembagaan Usaha

Belum terbentuk forum atau asosiasi yang mempertemukan pelaku usaha mikro di Majalengka Kulon secara rutin, menyebabkan potensi kolaborasi dan penguatan kelembagaan belum optimal. Padahal, sinergi antarpelaku dapat memperkuat daya tawar pasar, efisiensi produksi, dan berbagi pengetahuan.

Solusi:

- a. Fasilitasi pembentukan komunitas UMKM Majalengka Kulon sebagai forum belajar bersama, berbagi sumber daya, dan promosi kolektif.
- b. Penerapan prinsip *knowledge-based community empowerment* (Marouf, 2020), yaitu pemberdayaan melalui penguatan relasi sosial dan pertukaran pengetahuan di antara anggota komunitas.
- c. Integrasi kelembagaan dengan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.

5. Minimnya Pemahaman tentang Tanggung Jawab Sosial dan SDGs

Sebagian pelaku UMKM belum memahami pentingnya integrasi nilai sosial dan keberlanjutan lingkungan dalam usaha mereka. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya menjadikan UMKM sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Solusi:

- a. Sosialisasi dan workshop integrasi prinsip ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial dalam operasional UMKM, termasuk aspek hak konsumen, lingkungan, dan keterlibatan masyarakat.
- b. Edukasi tentang relevansi SDGs (Goal 8, 9, dan 11) dalam konteks usaha mikro dan pembangunan komunitas.
- c. Pendampingan penyusunan *business action plan* yang mengintegrasikan target sosial dan ekonomi secara seimbang.

Solusi-solusi yang diusulkan dalam program ini tidak hanya berorientasi pada teknis-praktis, tetapi juga dirancang berdasarkan kerangka teoretis dan panduan internasional yang relevan, antara lain:

1. *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda global untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan, terutama:
 - a. *Goal 8*: mendorong pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi,
 - b. *Goal 9*: mendorong inovasi dan infrastruktur inklusif,
 - c. *Goal 11*: membangun komunitas yang tangguh dan berkelanjutan (UNDP, 2023).
2. OECD Guidelines on Social Entrepreneurship (2023), yang menekankan perlunya usaha mikro untuk mengintegrasikan nilai sosial dalam model bisnis dan mendorong partisipasi komunitas secara aktif.
3. ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial, yang menjadi rujukan penting dalam memperkuat nilai etika, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan usaha (ISO, 2020).
4. Konsep *Knowledge-Based Community Empowerment* yang memandang bahwa pemberdayaan komunitas bukan hanya berbasis pada intervensi modal atau teknologi, tetapi juga melalui *knowledge transfer* dan pembentukan *social capital* berbasis relasi dan kepercayaan (Marouf, 2020; Al-Hakim & Hassan, 2022).

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dirancang dengan pendekatan participatory action research (PAR), di mana pelaku usaha mikro (mitra) tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek dalam proses pembelajaran, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Proses pelaksanaan dibagi menjadi empat tahapan utama sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan Mitra

Pada tahap awal ini dilakukan kegiatan:

- a. Koordinasi awal dengan mitra (BUMDes Majalengka Kulon dan komunitas pelaku usaha mikro) untuk penyamaan persepsi dan pemetaan potensi serta permasalahan.
- b. *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, kondisi usaha saat ini, serta preferensi intervensi dari pelaku usaha.
- c. Survei cepat dan observasi lapangan untuk memperoleh data *baseline* (data awal) sebagai pembanding pasca intervensi.

Hasil tahap ini menjadi dasar dalam perancangan materi pelatihan dan pendampingan yang relevan dan kontekstual sesuai kebutuhan riil mitra.

2. Tahap Peningkatan Kapasitas dan Transfer Pengetahuan

Pada tahap ini dilakukan pelatihan tematik dan workshop partisipatif yang mencakup beberapa topik utama, antara lain:

- a. Pelatihan Inovasi Produk dan Kemasan
 - 1). Teknik diversifikasi produk olahan pangan dan kerajinan.
 - 2). Penerapan *design thinking* untuk UMKM (Brown, 2019).
 - 3). Strategi inovasi berbasis kearifan lokal dan tren pasar.
- b. Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan Sosial
 - 1). Pengelolaan keuangan sederhana, pencatatan usaha, dan perencanaan bisnis mikro.
 - 2). Konsep dasar social entrepreneurship (OECD, 2023).
 - 3). Pengenalan *business model canvas* dan *social impact mapping*.
- c. Pengenalan Tanggung Jawab Sosial dan SDGs
 - 1). Workshop pengenalan prinsip ISO 26000:2020 tentang tanggung jawab sosial.
 - 2). Keterkaitan praktik usaha mikro dengan Goal 8, 9, dan 11 SDGs (UNDP, 2023).
 - 3). Diskusi penerapan nilai sosial dalam konteks lokal.

d. Pelatihan Literasi Digital dan Pemasaran Online

- 1). Teknik promosi digital menggunakan media sosial (Instagram, Facebook, TikTok).
- 2). Pembuatan konten produk dan storytelling untuk membangun merek lokal.
- 3). Penggunaan platform e-commerce sederhana (Shopee, Tokopedia, WA Business).

Setiap sesi pelatihan akan menggunakan metode *experiential learning*: diskusi kelompok, studi kasus lokal, praktik langsung, dan simulasi aplikasi.

3. Tahap Pendampingan dan Pembentukan Kelembagaan Komunitas

- a. Pendampingan individual dan kelompok kepada pelaku usaha dalam mengimplementasikan hasil pelatihan di usaha mereka (minimal 3 kali kunjungan per kelompok).
- b. Bimbingan pembentukan forum atau komunitas UMKM Majalengka Kulon, yang berfungsi sebagai wadah jejaring, tukar pengalaman, dan kolaborasi pemasaran.
- c. Penguatan peran BUMDes sebagai fasilitator bisnis dan agregator produk komunitas.

Proses ini menggunakan pendekatan *community-based empowerment*, yaitu membangun keberdayaan melalui penguatan relasi sosial, kepercayaan, dan kepemilikan bersama atas agenda pemberdayaan (Al-Hakim & Hassan, 2022).

4. Tahap Monitoring, Evaluasi, dan Diseminasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan secara berkelanjutan menggunakan beberapa metode:

- a. Monitoring proses (*formative evaluation*) selama pelatihan dan pendampingan.
- b. Evaluasi hasil (*summative evaluation*) menggunakan pre-test dan post-test pada peserta pelatihan.
- c. Pengumpulan testimoni dan studi kasus keberhasilan dari pelaku usaha yang mengalami perubahan signifikan.
- d. Refleksi bersama mitra dan pemangku kepentingan lokal (BUMDes, kepala desa) untuk menyusun rencana keberlanjutan.

Sebagai bagian dari akuntabilitas dan *knowledge sharing*, hasil kegiatan akan didiseminasikan dalam:

- a. Seminar internal institusi (pengabdian dan riset terapan).
- b. Artikel populer di media lokal/desa.
- c. Artikel ilmiah pada jurnal pengabdian terakreditasi.

5. Pendekatan Etis dan Keberlanjutan

Kegiatan ini menjunjung prinsip etika pengabdian yang mencakup:

- a. Kesukarelaan dan partisipasi aktif mitra.
- b. Transparansi dan keterbukaan dalam perencanaan kegiatan.
- c. Keadilan akses dan inklusivitas dalam partisipasi (gender, usia, jenis usaha).

Keberlanjutan program dijaga melalui:

- a. Transfer kapasitas kepada fasilitator lokal (pengelola BUMDes).
- b. Pembentukan forum UMKM desa yang dapat mengelola pelatihan lanjutan secara mandiri.
- c. Penjalinan kemitraan jangka panjang antara pelaku usaha dengan institusi perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa program telah memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kapasitas pelaku UMKM Desa Majalengka Kulon, yang tercermin dari partisipasi lebih dari 40 pelaku usaha dalam pelatihan dan pendampingan, serta adanya peningkatan skor kemampuan usaha setelah intervensi. Terbentuknya forum UMKM menjadi wadah strategis untuk kolaborasi, promosi, serta memperkuat jejaring antar pelaku usaha. Di sisi lain, lahirnya berbagai luaran tambahan seperti produk inovatif, media promosi digital, artikel ilmiah, dan publikasi populer tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga mendorong penyebaran pengetahuan dan praktik kewirausahaan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mitra sebesar 10–15%, memperluas jejaring bisnis, serta mewujudkan inklusivitas dengan melibatkan kelompok rentan dalam forum komunitas. Dampak yang dihasilkan bersifat multidimensi, mulai dari peningkatan kapasitas ekonomi lokal, penguatan kohesi sosial dan nilai tanggung jawab komunitas, hingga terjadinya transfer pengetahuan yang berkelanjutan dari perguruan tinggi ke masyarakat. Selain itu, keberhasilan program ini juga secara langsung mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8), inovasi dan infrastruktur (Goal 9), serta pembangunan komunitas berkelanjutan (Goal 11).

11). Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini tidak hanya memperkuat daya saing UMKM lokal, tetapi juga membangun fondasi kemandirian dan keberlanjutan komunitas desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73-84.
- Aziz, S., & Najicha, F. U. (2024). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Mewujudkan Cita-Cita Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 11-21.
- Chatterjee, S., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2022). Social entrepreneurship in rural communities: Opportunities and challenges. *Journal of Rural Studies*, 90, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.01.015>
- Darmawan, I. (2025). Sinergi Teknologi Informasi dan Kewirausahaan: Menyongsong Era Inovasi Yang Berkelanjutan Sebagai Strategi Untuk Penciptaan Nilai Tambah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jbm)*, 27-40.
- Dewi, Y. S. (2025). Analisis Arah Kebijakan Baru Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Menuju Swakelola Berbasis Komunitas. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 13(1).
- Elani, K. A., Pribadi, I. A. P., Sutikno, C., Amanda, A., & Atika, Z. R. (2025). Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas: Collaborative Governance in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kedungbanteng District, Banyumas Regency. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 77-95.
- Fitrawaty, F., & Maipita, I. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (Studi Kasus: Masa Pandemi Covid-19). *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 151-164.
- Fitri, S. (2021). Karakteristik UMKM di Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Fuhrotun, I., Rohman, F., & Puspitarani, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM (Studi Kasus Mebel di Desa Mantingan, Tahunan, Jepara). *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(3), 304-315.
- Hady, S., Aziz, A. A., & Azkar, M. (2025). Establishment Of Pt. Ulil Albab Management in Community Empowerment Efforts. *Jurnal Pendidikan Ips*, 15(1), 226-236.
- Ilhamsyah, M. Z., Firdaus, R., & Rasidi, M. (2025). Etika Bisnis dan Keberlanjutan Usaha: Studi pada UMKM Kuliner di Kabupaten Probolinggo. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 6493-6503.

- International Organization for Standardization. (2020). *ISO 26000: Guidance on Social Responsibility*. ISO Central Secretariat.
- Kraus, S., Palmer, C., Kailer, N., Kallinger, F. L., & Spitzer, J. (2021). Digital entrepreneurship: A research agenda on new business models for the twenty-first century. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 27(2), 233–251.
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 91-110.
- Malik, A., Djaganata, A. Y., Kurniawan, N. E., & Oktavia, Y. (2024). Analisis Strategi Pemasaran pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7155-7169.
- Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 593-614.
- OECD. (2021). *Social Entrepreneurship and Innovation*. OECD Publishing.
- Pangestuti, Y., & Sudrajat, B. (2025). Strategi Manajemen Inovasi dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Kuliner di Kecamatan Karangpucung. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 13(1), 102-112.
- Putri, D. A., Sari, N. M., & Nugroho, A. (2021). Knowledge-based community empowerment: A strategy for sustainable rural innovation. *Community Development Journal*, 56(3), 387–402.
- Rahman, E., Pertiwi, D. P., Dian, D., Astiani, D. N. I., Sinaga, E. G., Taufikurrohman, T., & Maulana, R. (2025). Analysis of Traditional Bamboo Woven Product Innovation to Increase the Competitiveness of UMKM Al-Ikhlas Stall Cipanas Tanjungkerta. *Jurnal Pengabdian FEB UNSAP*, 5(1), 1-6.
- Rahmawati, I., & Wahdiniwaty, R. (2022). Strategi kolaboratif dalam pemberdayaan UMKM berbasis digitalisasi dan pengetahuan lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 6(2), 123–135.
- Syuhada, W., Nugraha, A. T., Sugianto, H., & Hardikusuma, A. (2023). Strategi peningkatan kualitas pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 73-82.
- Telaumbanua, E. (2021). Kajian Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Taman Jajanan Pasar Kota Gunungsitoli. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1045-1058.
- United Nations. (2020). *The Sustainable Development Goals Report*. UN Publications.
- Zikri, M. (2024). Peran Serta Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa di Kabupaten Tanah Datar. *Journal of Community Development*, 3(3), 1-9.